

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270.203.900 jiwa dan telah diproyeksikan akan mencapai 275.773.800 jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2023). Kota Tasikmalaya tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 733.467 jiwa, dengan 79.392 jiwa berada pada Kecamatan Tamansari. Kelurahan Tamanjaya menempati urutan ketiga di Kecamatan Tamansari dengan populasi terbanyak yaitu 11.093 jiwa (BPS,2023). Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah merupakan dampak terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Umumnya yang menimbulkan banyak masalah adalah penambahan penduduk yang berlangsung terus menerus. Fenomena ini akan menjadi beban jika tidak diikuti dengan kualitas penduduknya. Pertumbuhan penduduk menentukan kesejahteraan manusia, oleh sebab itu pertumbuhan penduduk harus mendapat perhatian sehingga pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan lancar serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Hutasoit, 2016, p.153).

Konsep pembangunan pemerintahan selama ini belum mampu menjawab tuntutan dari masyarakat menyangkut pemerataan, keadilan serta keberpihakan pada masyarakat, sehingga belum bisa mengangkat garis kemiskinan pada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan akan kepentingan masyarakat tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (empowerment) yang digunakan sebagai model pembangunan berdimensi pada rakyat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat (Noor, 2011, pp. 89-90).

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat (Noor, 2011, p.90). Undang-Undang Nomor

52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berkualitas memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat (Noor, 2011, p.90). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berkualitas menekankan bahwa BKKBN tidak terbatas pada kewenangan atas masalah Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Keluarga Sejahtera saja, namun hal ini menyangkut juga pada masalah pengendalian penduduk (BKKBN, 2016). Presiden Joko Widodo mengamanatkan BKKBN agar mampu menyusun program yang bisa memperkuat upaya dalam pencapaian target Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat langsung bersentuhan dan menebarkan manfaat bagi rakyat Indonesia di semua tingkatan wilayah. Kemudian disepakati agar BKKBN dapat segera membentuk Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (BKKBN, 2016).

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau yang setara serta memiliki kriteria tertentu dan memiliki keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait. Kampung KB dibentuk dengan tujuan umum dapat meningkatkan kualitas kesehatan tingkat kampung dan yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga berkualitas dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (BKKBN, 2016). Salah satu aspek kualitas kesehatan yang dimaksud adalah mengenai kualitas kesehatan. Terdapat berbagai macam kegiatan dalam program Kampung KB yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan kampung KB yaitu sebagai pembangunan masyarakat. Kegiatan pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan antara lain penyuluhan KB-KR, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) (Lestari et al., 2020, p.2). Program yang beragam itu merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan pembangunan kependudukan mulai dari tingkat wilayah rendah yaitu kampung dan

Kelurahan atau Desa. Jika pembangunan di semua kampung telah mengalami kemajuan, desa juga akan mengalami kemajuan pula. Hal ini akan mempengaruhi kemajuan dari sebuah negara (Aji & Yudianto, 2020, p.208).

Dalam pelaksanaan Kampung KB tidak terbatas hanya pada pengendalian jumlah penduduk dan juga menangani penggunaan KB saja, tetapi dalam prosesnya terdapat pendidikan yang diberikan bagi masyarakat. Pendidikan yang terjadi memiliki peranan yang penting untuk manusia agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai sarana meningkatkan kehidupannya di masa yang akan datang. Pendidikan yang terjadi di dalam program Kampung KB merupakan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dinilai bisa memberikan respon yang lebih baik dalam melayani pendidikan bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Kriteria keluarga sasaran yaitu kampung yang memiliki jumlah keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa kampung tersebut berada, juga jumlah peserta KB yang ada pada tingkat desa tersebut. Untuk kriteria wilayah yang dijadikan tujuan utama pembangunan kampung KB antara lain yaitu lingkungan yang kumuh kumuh, kampung nelayan atau pesisir, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan daerah padat penduduk.

Kampung KB Cidahu berada pada RW 010 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti kepada kader Kampung KB ibu Noris, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pola hidup yang bersih dan sehat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat juga masih rendah. Di antaranya masih ada rumah yang belum memiliki fasilitas toilet dan tidak memiliki tangki septik, sehingga menggunakan kolam ikan untuk buang air besar, hal ini sangat tidak dibenarkan dalam kesehatan. Serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi gizi seimbang masih rendah, sehingga masih terdapat balita dengan kasus stunting. Permasalahan-permasalahan tersebut semakin didukung dengan lokasi daerah cukup jauh dari pusat kota, sehingga menjadikan daerah Cidahu seperti terasing dan jauh dari informasi karena sulit mengakses fasilitas kesehatan terdekat.

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan kualitas kesehatan masyarakat di kampung tersebut, maka pada tanggal 10 Agustus 2018 dibentuklah Kampung KB Cidahu. Berdasarkan hasil observasi Cidahu sebagai kampung KB mempunyai beberapa kelompok kegiatan yang digunakan sebagai media dalam rangka pencapaian kampung Keluarga Berkualitas salah satunya adalah meningkatnya kualitas kesehatan, antara lain Bina-Keluarga-Lansia (BKL), Bina-Keluarga-Remaja (BKR), Bina-Keluarga-Balita (BKB), dan Sekretariat Kampung KB. Kelompok yang telah dibentuk berjalan secara terintegrasi karena semua lini ada keterkaitan antara satu sama lain. Pembentukan Kampung KB Cidahu ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam program sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada sehingga dapat mengarah pada perubahan perilaku, pola pikir, dan sikap masyarakat, serta terjadinya pengembangan pola hidup menjadi lebih bersih dan sehat, sehingga terjadinya peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan (Studi pada Kampung KB Cidahu RW 010 Kelurahan Tamanjaya).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Kampung Cidahu RW 010 Kelurahan Tamanjaya merupakan daerah perkampungan yang jauh dari pusat kota, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan terdekat.
- 1.2.2 Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimanakah tahapan dan hasil pemberdayaan masyarakat melalui kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam meningkatkan kualitas kesehatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti berdasar pada rumusan masalah tersebut yaitu: untuk mengetahui tahapan dan hasil pemberdayaan masyarakat melalui kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan masalah yang sama, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya pada Kampung KB.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1) Kampung KB Cidahu RW 010

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan program kampung KB yang diselenggarakan di Cidahu RW 010 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya agar dapat terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan tujuannya. Serta dapat menjadi contoh bagi kampung lain sehingga masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya kualitas kesehatan.

2) Peneliti

Kegunaan penelitian untuk peneliti sendiri ialah, untuk mengetahui upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program kampung KB. Serta mengetahui pengelolaan dalam upaya pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sehingga nantinya peneliti dapat melakukan pengembangan masyarakat melalui program-program lainnya.

3) Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pendidikan Masyarakat untuk dapat menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk menawarkan klarifikasi, sehingga meminimalkan ketidakakuratan dalam pemilihan instrumen pengumpulan data. Dalam konteks ini, penulis akan menggambarkan beberapa terminologi yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya:

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat atau keluarga dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kondisi kemiskinan dan dari keterbelakangan. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada keluarga/masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan pada masyarakat yang diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan dan peningkatan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri sampai mereka pada tahap mandiri dan sejahtera.

1.6.2 Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Kampung KB didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu serta terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis. Tujuan umum adanya pembentukan Kampung KB yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan pada wilayah kampung atau yang setara melalui Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Wujud pembangunan keluarga berkualitas

dilakukan dengan pelaksanaan program Kampung KB yang tidak terbatas hanya pada pengendalian penduduk dan juga penggunaan KB saja, tetapi dalam prosesnya terdapat pendidikan yang terjadi di dalamnya bagi masyarakat.

1.6.3 Kualitas Kesehatan

Kualitas kesehatan merupakan tingkatan baik atau buruknya keadaan jiwa dan raga seseorang. Kualitas kesehatan dapat dilihat dari pola kehidupan orang tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan dapat dilakukan dengan melaksanakan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Dalam mengevaluasi kualitas kesehatan masyarakat, beberapa faktor penting diidentifikasi, yang meliputi lingkungan, pola perilaku, dan layanan kesehatan.